



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 100.4/52/ 2026

## **TENTANG**

### **PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan berdasarkan usulan OPD/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah sebagaimana termasuk dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Kepala OPD/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tenggara dan Peraturan Daerah, agar segera mempersiapkan Draft Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/unsur terkait lainnya jika dipandang perlu;
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan /mekanisme pembentukan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : 19 Februari 2026



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD Kab. Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
 NOMOR : 100.4/ 52 /2026  
 TANGGAL : 19 Februari 2026

**PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

| NO | SKPK                     | TENTANG                                                                                                               | JENIS |            |      | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                         | PELAKSA<br>NAAN | KET |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |                          |                                                                                                                       | RUTIN | REVI<br>SI | BARU |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |
| 1  | 2                        | 3                                                                                                                     | 4     | 5          | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8               | 9   |
| 1  | DPMK                     | Pengelolaan Alokasi Dana Kute Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 | ✓     |            |      | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengalokasian ADD, pembagian ADD kepada setiap Desa, dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota | 2026            |     |
| 2  | DPMK                     | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2026                                           | ✓     |            |      | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun                                                                                             | 2026            |     |
| 3  | BAPPEDA                  | Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2029                                 | ✓     |            |      | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2029                                                                                                                           | 2025-2029       |     |
| 4  | RSUD H. SAHUDIN KUTACANE | Pembagian Jasa Layanan Kesehatan di RSUD H. SAHUDIN KUTACANE                                                          |       |            | ✓    | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukung Biaya Operasional Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional                                                               | 2026            |     |

|   |                             |                                                                                                                                             |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 5 | RSUD H. SAHUDIN<br>KUTACANE | Pedoman penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane.                                  |  |  |  | ✓ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane                                                 | 2026 |  |
| 6 | DPMK                        | Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu serentak                                                                                            |  |  |  | ✓ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa | 2026 |  |
| 7 | RSUD H. SAHUDIN<br>KUTACANE | Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane                                              |  |  |  | ✓ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                                                                                                                 | 2026 |  |
| 8 | DPMK                        | Petunjuk Teknis Pemilihan Pengulu Serentak                                                                                                  |  |  |  | ✓ | Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak                                                                                                                                                                                                 | 2026 |  |
| 9 | RSUD H. SAHUDIN<br>KUTACANE | Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan layanan Umum Daerah RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Yang Berasal dari Non PNS |  |  |  | ✓ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                                                                                                                 | 2026 |  |

